



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Tata Cara Penerbitan Surat Teguran Pajak Daerah Lainnya

2024

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)
BIDANG PENAGIHAN DAN PEMERIKSAAN**

Jl. Sawahan No. 50 Kota Padang, Sumatera Barat (25121)
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id

Nomor SOP	900.1.6.1/05.2024/bapenda-Pdg/2024
Tanggal	18 September 2024
Dibuat	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	18 September 2024
Disahkan oleh	 Kepala Badan Pendapatan Daerah, Drs. Yosefriawan NIP. 19650930 198602 1 002
Judul SOP	Tata Cara Penerbitan Surat Teguran Pajak Daerah Lainnya

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Kualifikasi Pelaksana

D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/ Manajemen/ Administrasi/ Teknik Infomatika/ Manajemen Teknik Infomatika atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p>	
<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>	
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);</p>	
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);</p>	
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);</p>	
<p>Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);</p>	
<p>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);</p>	

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);	
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);	
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2024.	
Peraturan Wali Kota Padang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024.	
Peringatan (hal2 yg akan terjadi di luar SOP)	Peralatan/Perlengkapan
Kesalahan penulisan alamat surat teguran	
Draft tidak segera diparaf	
Draft tidak segera ditandatangani	

TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN PAJAK DAERAH LAINNYA (SELF ASSESSMENT)

No.	Uraian Prosedur						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan	Sekretaris	Kabid. Penagihan dan Pemeriksaan	Kasubid. Penagihan	Koordinator Pajak/Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	mengecek data Pajak Daerah Lainnya yang belum membayar pajak sesuai masa jatuh tempo SKPD pada Aplikasi Sipadeh					← Mula				
2	membuat draft Surat Teguran I, II dan III Pajak Daerah Lainnya							15 Menit	Printout Draft Surat Teguran I, II dan III	
3	memeriksa, meneliti dan memaraf draft Surat Teguran I, II dan III untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian						Printout Draft Surat Teguran I, II dan III	10 Menit	Printout Draft Surat Teguran I, II dan III	
4	memeriksa, meneliti, dan memaraf draft Surat Teguran I, II dan III untuk selanjutnya diteruskan ke Sekretaris						Printout Draft Surat Teguran I, II dan III	10 Menit	Printout Draft Surat Teguran I, II dan III	
5	memeriksa, meneliti dan memaraf draft Surat Teguran I, II dan III untuk selanjutnya diteruskan ke Kepala Badan untuk ditandatangani						Printout Draft Surat Teguran I, II dan III	10 Menit	Printout Draft Surat Teguran I, II dan III	
6	menandatangani Surat Teguran I, II dan III						Printout Draft Surat Teguran I, II dan III	10 Menit	Printout Draft Surat Teguran I, II dan III	
7	Proses Selesai					Selesai				

DAFTAR RIWAYAT REVISI

No.	Tanggal Revisi	Perubahan	No.	Tanggal Revisi	Perubahan